



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 816/V/2014

III/MEI 2014

Politik Uang Matikan Demokrasi



KEGIATAN DPR-RI MINGGU KEDUA MEI 2014

Minggu kedua bulan Mei 2014 ini, Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 dibuka. Setelah reses hampir dua bulan selama Pileg 2014, Anggota DPR kembali menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut ini ringkasan kegiatan Anggota DPR pada Minggu kedua Mei 2014.

Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV

Sebelum menyampaikan Pidato, Ketua DPR menyampaikan 16 surat masuk yang ditujukan kepada DPR dengan rincian sebagai berikut: 3 surat masuk dari DPD-RI tertanggal 4 Maret perihal penyampaian keputusan DPD-RI; 2 surat dari BPK-RI perihal penyampaian Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2013 dan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan, perihal pemberitahuan akan berakhirnya masa jabatan 4 anggota BPK-RI; 12 surat masuk dari Presiden, perihal penunjukkan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang Pencarian dan Pertolongan, RUU tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI, perihal usul calon Deputy Gubernur BI, penyampaian RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; perihal penyampaian calon pengganti antar waktu anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional, permohonan pertimbangan bagi calon Duta Besar dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk RI yaitu Republik Korea, Nepal, RRT, kepulauan Solomon. Surat-surat tersebut diselesaikan sesuai mekanisme Dewan.

Adapun permintaan pertimbangan berkaitan dengan pertimbangan pencalonan Duta Besar LBBP negara sahabat diproses melalui konsultasi antara pimpinan Dewan, Pimpinan Komisi I dan pimpinan Fraksi-fraksi yang telah dilaksanakan pada 17 maret dan 29 april.

Isi pidato pembukaan masa persidangan IV 2013-2014 yang dibacakan oleh wakil Ketua DPR Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, antara lain disampaikan bahwa Pimpinan bersyukur, Pemilu Legislatif April 2014, telah dapat dilalui dengan selamat, aman dan lancar, walaupun ditengarai ba-

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie



nyak terjadi kecurangan, terutama manipulasi suara di sejumlah daerah yang dapat memunculkan gugatan. Bangsa Indonesia juga bersiap menyongsong agenda politik berikutnya, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung 9 Juli 2014, diharapkan dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar, akan menghasilkan pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk kurun lima tahun ke depan.

Fokus kegiatan Dewan pada Masa Persidangan IV adalah Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, melanjutkan pembahasan dan penyelesaian RUU-RUU Prioritas 2014, melanjutkan tugas pengawasan melalui Tim-Tim yang telah dibentuk DPR-RI, pengawasan lain yang dilakukan oleh Komisi-Komisi terhadap masalah-masalah yang berkembang di tingkat nasional, dan tindak lanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan

Semester II BPK-RI 2013. Apabila Pemerintah mengajukan RUU APBN-Perubahan 2014, maka Dewan akan melakukan pembahasan sesuai mekanisme Dewan.

Dalam fungsi legislasi, DPR-RI akan melanjutkan pembahasan RUU yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, sebanyak 106 RUU, yaitu 33 RUU Prioritas dan 73 RUU Kumulatif Terbuka. RUU Prioritas ditangani oleh hampir seluruh Komisi-Komisi DPR dan Panitia-Panitia Khusus. RUU Kumulatif Terbuka yang ditangani, diantaranya adalah RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) sebanyak 65, serta 4 RUU Kumulatif Terbuka berkaitan dengan Pengesahan Perjanjian Internasional. Sejumlah 4 RUU Daerah Otonom Baru yang akan segera tuntas karena telah mengalami beberapa kali masa perpanjangan adalah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Muna Barat, dan Kota Raha,



yang semuanya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, sebagaimana diketahui, RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015-2019, sekaligus pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya. Sementara itu, presiden terpilih periode berikutnya, tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-Perubahan). Oleh karena itu, APBN yang akan diajukan oleh Pemerintah bersifat *base line*, yaitu hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, belum memperhitungkan inisiatif baru.

Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR tetap berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan fungsi pengawasan. Tim Pengawas yang telah dibentuk DPR adalah Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tentang Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dan Tim Pengawas terhadap Perlindungan TKI di Luar Negeri.

Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Dewan menghendaki agar amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, benar-benar mampu memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan agar kasus-kasus hukum yang menimpa TKI, tidak berulang kembali. Permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa, sangat kompleks dan bersifat *cross culting* sektoral. Permasalahan TKI sudah muncul sejak pra-penempatan, penempatan dan purna-penempatan, sebagian besar permasalahan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri, dan melibatkan 21 (duapuluh satu) kementerian/lembaga dan badan. Dalam pelaksanaannya, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Badan masih cenderung mengedepankan ego-sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik.

Untuk materi-materi yang diangkat oleh Pimpinan dalam pidato pembukaan persidangan IV ini antara lain, Dewan menyoroti bahwa berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, kita perlu melakukan introspeksi agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih sempurna. Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata sangat dirasakan oleh para calon legislatif. Politik uang benar-benar mengkhawatirkan, dan apabila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat Pemilu Presiden/Wakil

Presiden yang akan datang. Politik uang tidak bisa dianggap remeh karena dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan melakukan evaluasi terhadap UU terkait. DPR menghimbau agar KPU dan seluruh pihak penyelenggara Pemilu, dapat mengambil pelajaran dari proses Pemilu yang telah dilaksanakan.

Selain masalah korupsi, Pimpinan juga menyinggung masalah persiapan secara matang dan komprehensif menuju pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, harus memanfaatkan peluang ini dengan mempersiapkan semua sektor, ekonomi, sumber daya manusia, dan perangkat hukum yang dibutuhkan. Dengan demikian, Indonesia akan lebih siap menghadapi pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN Tahun 2015. Pemerintah harus berperan menciptakan stabilitas kawasan dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Secara khusus, Pemerintah juga harus mempersiapkan sektor perdagangan dan industri dalam negeri, agar dapat memanfaatkan momentum ini dengan meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN.

Hal lain yang disoroti secara tajam adalah pelaksanaan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dewan pada prinsipnya mendukung konsistensi Pemerintah untuk melaksanakan amanat UU Minerba, karena Dewan sadar bahwa kebijakan hilirisasi atau pembangunan industri hilir (*smelter*), akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus membuka lapangan kerja baru. Namun demikian, Dewan mengingatkan bahwa pembangunan *smelter* memerlukan waktu persiapan tiga sampai empat tahun dan biaya yang sangat besar, apalagi bisnis pertambangan memiliki resiko ketidakpastian yang tinggi. Oleh karena itu, Dewan berharap Pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan iklim usaha di sektor pertambangan, dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi perusahaan tambang yang berniat membangun *smelter* di dalam negeri. Tujuan dari insentif ini adalah memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pertambangan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif. Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik di lokasi pabrik.

Untuk masalah Ujian Nasional, Dewan bersyukur, penyelenggaraan Ujian Nasional tahun ini berjalan dengan lebih baik, meskipun masih ditemukan beberapa kekurangan sehingga tetap diperlukan evaluasi. Untuk masalah kekerasan seksual pada anak, Dewan meminta perhatian semua pihak agar melakukan langkah konkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa. Dewan meminta Presiden untuk melakukan gerakan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicerai oleh kekerasan. Dewan sepenuhnya mendukung usulan KPAI, agar dilakukan pencanangan "Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan terhadap Anak Indonesia."

Untuk kegiatan diplomasi parlemen, dilaporkan bahwa Dewan telah dan akan mengirim berbagai delegasi dalam berbagai pertemuan *parliamentary meeting*, yaitu *The*

Second World e-Parliament Conference yang dilaksanakan di Majelis Nasional Republik Korea, Seoul pada tanggal 8-10 Mei yang lalu; *Preparatory Meeting* dan *ASEAN Leaders Meeting with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representatives* pada tanggal 11 Mei 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN ke-24; *AIPA Caucus* yang diselenggarakan pada tanggal 10-13 Juni

2014 di Brunei Darussalam; *APA Troika Meeting* di Pakistan tanggal 27 Mei 2014; dan tuan rumah Sidang APA *Standing Committee on Economic and Sustainable Development* pada tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta, yang mengangkat tema “*Alleviating Poverty Through the Implementation of Sustainable Development*”. ***

Politik Uang Matikan Demokrasi



Suasana Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung menegaskan, politik uang pada Pemilu 2014 benar-benar mengkhawatirkan, dan apabila tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan akan berulang kembali pada saat Pemilu Presiden/Wakil Presiden yang akan datang.

“Politik uang tidak bisa dianggap remeh karena dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan melakukan evaluasi terhadap UU terkait,” ujarnya saat menyampaikan Pidato Pembukaan masa sidang IV, di Gedung Nusantara II, Senin, (12/5).

Untuk itu dia menghimbau agar KPU dan seluruh pihak penyelenggara Pemilu, dapat mengambil pelajaran dari proses Pemilu yang telah dilaksanakan.

“Proses rekapitulasi suara pada Pemilu 9 April yang lalu, tidak berjalan mulus oleh banyaknya protes, baik dari para saksi, para caleg maupun masyarakat, karena menganggap rekapitulasi data banyak yang tidak benar,” jelasnya.

Dewan mengharapkan, Penyelenggara Pemilu benar-benar menunjukkan profesionalitas, sehingga tahapan Pilpres nanti dapat dilaksanakan sesuai jadwal, berjalan lancar melalui mekanisme demokrasi, sesuai aturan perundang-undangan. Apabila terjadi pelanggaran, sebaiknya diselesaikan melalui proses pengadilan.

Pramono berpesan agar para Anggota Dewan terpilih hendaknya menyadari bahwa harapan masyarakat Indonesia begitu tinggi. “Masyarakat menginginkan agar mereka

mampu menangani masalah-masalah bangsa yang makin berat, seperti masalah ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, serta masalah internal DPR yaitu peningkatan kinerja DPR dalam pelaksanaan fungsi-fungsi utamanya,” katanya.

Para anggota DPR Periode 2014-2019, ungkap Pimpinan Dewan ini, harus dapat menjaga marwah lembaga DPR sebagai lembaga wakil rakyat. “Berdasarkan hasil Pemilu Legislatif 2014 yang lalu, kita perlu melakukan introspeksi agar pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih sempurna. Bila kita lihat, masalah politik uang ternyata sangat dirasakan oleh para calon legislatif,” tambahnya.

Kecurangan Sistematis

Komentar yang sama dilontarkan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso bahwa kecurangan yang sistematis dan masif dilakukan hampir di semua lini penyelenggaraan pemilu. Semua pihak patut prihatin atas politik uang yang mewar-nai pemilu.

Dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV DPR, Senin (12/5) lalu, interupsi juga banyak dilontarkan para anggota DPR RI seputar kekecewaan terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif. Priyo mengemukakan, pemilu memang terancam oleh banyak pengaduan dan wacana pembentukan Pansus dari DPR.

“Memang penyelenggaraan pemilu kali ini luar biasa. Banyak sekali kecurangan secara sistematis di semua lini. Kalau ini kita teruskan, demokrasi kita terancam bahaya. Karena itu harus ada perbaikan-perbaikan,” kata Priyo, usai mengikuti Rapat Paripurna DPR RI.

Menurut Priyo, wacana membentuk Pansus soal pemilu bisa saja dibentuk. “Kami dari pimpinan tidak melarang dan tidak pula menganjurkan,” tutur politisi Partai Golkar tersebut. Komisi II bisa saja bersikap untuk menyelamatkan

demokrasi ke depan lewat pembentukan Pansus pemilu.

Sementara rekannya dari FPG Nurdiman Munir mengungkap tindakan penyelewengan Pemilu legislatif 2014 dilakukan secara masif, sistematis dan terstruktur oleh oknum penyelenggara Pemilu. “Kenapa Bawaslu dan pihak yang bertanggung jawab mengawasi Pemilu membiarkan kasus penyelewengan ini,” ujarnya

Menurutnya, apabila kejadian ini berlangsung seperti yang kita lihat maka anggota DPR yang akan datang tidak akan di pandang orang karena mereka menduduki kursi haram, dengan cara kotor dan melanggar aturan, bahkan melakukan tindak pidana pemilu serta korupsi.

“Perlu ditegaskan tindak pidana Pemilu bukan delik aduan tanpa adanya pelaporanpun Bawaslu dan pihak berwenang punya kewajiban melaksanakan tindakan terhadap penyelewengan tersebut,” katanya.

Dia menambahkan, perlu segera ditangani secara serius. Karena itu, Komisi II perlu mengawasi dan menanyakan langsung terkait penyelenggaraan Pemilu ini. Begitu juga Komisi III akan melihat dari sisi hukumnya.

Sementara Anggota DPR Parlimungan Hutabarat (Fraksi Demokrat) mendesak para pimpinan Dewan untuk segera memanggil Bawaslu, KPU termasuk Polri terkait penyelewengan Pemilu. “Bahkan kalau perlu segera dibikin Pansus terhadap penyelewengan ini,” tegasnya.

Menurutnya, banyak oknum penyelenggara Pemilu tidak segan meminta langsung kepada para Caleg terkait pembelian suara ini. “Berdasarkan pengamatan di lapangan Bawaslu isinya orang-orang yang tidak bermoral, begitu juga KPU, penyelewengan ini dilakukan sistemik terstruktur dan masif,” ujarnya dengan nada tinggi. (si, mh)/foto:andry/parle/hr.

Sasaran Pedofilis Daerah Tujuan Wisata

Anggota Komisi VIII DPR, Gde Sumarjaya Linggih menilai selain merevisi UU Perlindungan Anak dan mengamandemen KUHP, hal lain yang terpenting adalah penanganan dan perlindungan serta pencegahan di tingkat daerah dan seluruh elemen masyarakat. Terutama di daerah-daerah yang termasuk tujuan wisata internasional. Hal tersebut dikatakannya kepada Parle, Selasa (13/5) usai rapat audiensi dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) daerah Bali dan Bekma FEB Undiknas Denpasar.

“Bali merupakan tujuan wisata favorit bagi masyarakat internasional, sehingga bisa dikatakan sebagai tempat transit orang-orang internasional atau turis asing, dimana didalamnya juga terdapat pedofilis (pelaku pedofilia) beserta jaringannya. Jaringan pedofilis ini kemudian berpindah-pindah negara dan daerah untuk melakukan kebiasaannya itu. Dengan demikian di Bali berkembang pedofilis-pedofilis, yang akhirnya menular ke orang lokal juga,” papar Demer, begitu politisi dari Fraksi Golkar ini biasa disapa.



Anggota Komisi VIII DPR Gde Sumarjaya Linggih.

Ditambahkan Demer, sebenarnya sebelum terkuaknya kasus pedofilia di lingkungan JIS, di Bali sendiri kasus tersebut sudah ada dan berkembang

lebih dulu. Bahkan jika diibaratkan seperti gunung es. Oleh karena itu selain dari sisi legislasi atau lewat perundang-undangan, perlu juga langkah tegas dari pemerintah, kepolisian serta Interpol, termasuk juga elemen masyarakat lainnya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Bali, AAA Ngr Tini Rusmini Gorda, para pedofilis sengaja melancarkan aksinya di daerah tujuan wisata. Dimana masyarakat di daerah wisata itu bersikap lebih terbuka dan berkonsep ramah yang pada akhirnya menjadi boomerang bagi anak-anak mereka. Terlebih lagi adanya *mindset* atau pikiran di masyarakat kita yang

sangat bangga jika anaknya diajak orang bule (orang asing-red). Padahal tidak semua turis asing tersebut memiliki niat baik kepada anak-anak tersebut.

“Pedofilia di Bali sudah ada dan berkembang jauh sebelum terbongkarnya kasus Pedofilia di JIS. Bahkan pelaku pedofilia internasional sendiri yang merupakan buronan FBI, William saat UU Perlindungan anak diberlakukan dia tertangkap dan diputuskan di Karangasem, Bali hingga kemudian bunuh diri,” ujar Tini.

Oleh karena itulah BKOW sebagai salah satu elemen masyarakat Bali tengah gencar melakukan edukasi ke-

pada masyarakat bahwa ada hal yang harus juga diwaspadai dari kedekatan anak-anak terhadap pihak asing. Gerakan sosialisasi tentang upaya-upaya menyelamatkan anak sebagai aset bangsa dari perbuatan pedofilia.

“Selain pihak sekolah, kami juga mengedukasi dan merubah *mindset* keluarga dan masyarakat. Sehingga kami sempat mencanangkan gerakan Keluarga ramah anak. Keluarga itu tidak hanya ibu, melainkan juga ayah, kakak dan seluruh anggota keluarga lainnya yang juga berkewajiban melindungi anak dari pedofilis-pedofilis,” ungkapnya. (Ayu) foto:andry/parle/hr.

Komisi VIII Usulkan Revisi UU PA dan Amandemen KUHP



Ketua Komisi VIII DPR RI Ida Fauziyah didampingi beberapa anggota Komisi VIII foto bersama BKOW daerah Bali dan Bekma FEB Undiknas Denpasar.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah akan segera mengusulkan tambahan prolegnas (program legislasi nasional) berupa revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, dan akan memberi masukan untuk mengamandemen KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) karena dinilai kedua produk Undang-undang tersebut be-

lum mampu melindungi anak Indonesia secara utuh dari tindak kekerasan dan pelecehan.

Hal tersebut diungkapkan Ida saat rapat audiensi dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) daerah Bali dan Bekma FEB Undiknas Denpasar, Selasa (13/5) di ruang rapat

Komisi VIII DPR RI, Senayan Jakarta.

“Kita akan segera mungkin mengusulkan kepada Baleg (Badan legislasi) untuk memasukkan revisi UU PA No.23 tahun 2002 dan KUHP. Mengingat saat ini tingkat kekerasan dan pelecehan terhadap anak sangat tinggi, sehingga kedua langkah tersebut harus segera dilakukan,” jelas Ida.

Ditambahkannya, ada beberapa hal yang harus direvisi dari UU No.23 Tahun 2002, diantaranya masa hukuman bagi pelaku tindak kekerasan terhadap anak minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun yang dinilai masih sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera.

“Maksimal 15 Tahun memang cukup lama, tapi pada kenyataannya para pelaku kekerasan terhadap anak tidak pernah dijatuhi hukuman maksimal. Oleh karena itulah dalam revisi UU Perlindungan Anak no.23 tahun 2002 nanti hukuman bagi pelaku harus diperberat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku, dan tidak ada lagi anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)

Bali, AAA Ngr Tini Rusmini Gorda mengatakan tidak hanya UU Perlindungan anak saja yang harus direvisi, namun KUHP (Kitab undang hukum pidana) juga harus segera diamandemenkan. Karena dalam KUHP saat ini belum mengatur secara tegas tentang pengertian pedofilia dan unsur-unsur pedofilia, klasifikasi korban kejahatan, kualifikasi delik, dan jenis sanksi pidana, serta sifat sanksi pidana yang dapat menimbulkan efek jera secara

husus terhadap pelaku pedofilia.

“Selain itu dalam amandemen KUHP mendatang kami juga mengusulkan perlunya pasal yang mengatur secara khusus dan tegas adanya tindakan perlindungan korban secara represif berupa ganti rugi (restitusi atau kompensasi) dan perlindungan korban secara kuratif berupa bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial, baik dalam kebijakan formulasi maupun dalam

kebijakan aplikasi yang diintegrasikan dengan mengamandemen UU No.13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban,” papar Tini.

Menjawab aspirasi dari Ketua BKOW tersebut, Ida Fauziyah berjanji akan segera menindaklanjutinya dengan membicarakannya kepada Komisi III yang kemudian akan diusulkan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. (Ayu) *foto:andry/parle/iw.*

Anak Korban Kekerasan Harus Dilindungi

Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak sangat mengagetkan banyak pihak. Yang tak disangka, tersangka dalam kejadian ini juga masih anak-anak. Banyak kecaman kepada pelaku, agar dihukum berat. Namun, perhatian juga harus diberi kepada korban. Pasalnya, perlakuan negatif ini, dapat meninggalkan trauma bagi anak.

Wakil Ketua Komisi VIII Sayed Fuad Zakaria menyatakan, korban kekerasan dan pelecehan ini harus dilindungi. Ia memberikan catatan, perlindungan kepada korban bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tapi juga pemerintah.

“Tentu bagi para korban, harus dilindungi. Apalagi korbannya relatif masih berusia anak-anak. Ini tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada orang tua. Walaupun orang tuanya langsung yang membina anaknya. Untuk mengembalikan dampak negatifnya, yaitu trauma bagi si anak, harus mendapat perhatian dari pemerintah. Anak harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai masa depannya rusak,” tegas Sayed, ketika ditemui di Gedung Nusantara II, baru-baru ini

Politisi Golkar ini menambahkan, jangan sampai kedepannya, para korban ini melakukan hal negatif yang dialaminya, ketika dewasa nanti. Sehingga, harus benar-benar dibina, untuk menghilangkan efek trauma.

“Kita tidak ingin generasi muda yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan, ketika dewasa, malah melakukan hal yang sama. Anak harus benar-benar dibina, agar traumanya terobati, dan dapat kembali ke masyarakat. Ini juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah, jangan hanya diserahkan kepada orang tua saja,” saran Sayed.

Politisi dari Dapil Nanggroe Aceh Darussalam ini mengaku sangat menyayangkan kejadian yang menimpa anak Indonesia. Ia menilai, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk melindungi generasi muda.

“Kita sangat prihatin terhadap kekerasan yang terjadi



Wakil Ketua Komisi VIII DPR Sayed Fuad Zakaria.

pada anak. Yang terpenting saat ini adalah implementasi supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini. Paling tidak, kejadian ini bisa diminimalisir. Sampai saat ini KPAI juga masih dipertanyakan, apakah ada KPAI di daerah. Seolah-olah sekarang ini hanya ada di pusat saja. Belum ada rasa supaya anak itu terlindungi,” imbuh Sayed.

Ia juga mengecam pelaku kekerasan dan pelecehan seksual. Ia berharap, para pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, sehingga menimbulkan efek jera.

“Memang, selama ini belum ada efek jera. Harus ada efek jera. Artinya, jika belum ada hukumannya tidak kuat, maka bisa saja akan terjadi terus. Oleh karena itu, peradilan anak atau peradilan kriminal apapun, yang berhubungan dengan kekerasan anak, maka harus diberi hukuman yang berat, agar menimbulkan efek jera,” tegas Sayed. (sf) *foto:iwan armanias/parle/hr.*

Kerja Sama Industri dengan Kroasia Sangat Terbuka



Ketua BKSAP DPR Surahman Hidayat saat menerima Dubes Kroasia untuk Indonesia Drazen Margeta.

Kerja sama industri dengan negara Kroasia sangat terbuka. Kroasia termasuk maju di bidang industri perkapalan dan persenjataan. Ini peluang menarik bagi industri nasional untuk mengembangkan diri dengan membuka kerja sama strategis kedua negara.

Demikian terungkap dalam perbincangan antara Duta Besar Kroasia untuk Indonesia Drazen Margeta de-

ngan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Surahman Hidayat, di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (13/5). Kedatangan Margeta ke DPR untuk memberikan informasi seluas-luasnya tentang negara Kroasia kepada delegasi BKSAP DPR yang akan berkunjung ke Kroasia pekan depan.

“Pekan depan grup kerja sama bilateral DPR dan Kroasia akan berkunjung

ke Kroasia. Dubesnya sudah memberi informasi-informasi tambahan yang sangat bermanfaat. Kunjungan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama antarkedua negara. Ada beberapa potensi, di bidang industri, pariwisata, dan beberapa potensi lainnya yang belum tergal. Ini merupakan tantangan dan peluang,” ungkap Surahman (F-PKS), usai pertemuan.

Anggota Komsis X ini menjelaskan, Kroasia sangat maju di bidang perkapalan dan persenjataan. Sebagai negara kepulauan seperti Indonesia, Kroasia mengembangkan industri perkapalannya, baik untuk transportasi maupun militer. Sementara industri persenjataan Kroasia, sudah mengeksport jenis pistol ke Amerika Serikat.

“Kita akan dorong para expert dari Kroasia bisa datang ke Indonesia, baik ke PT. PAL di Surabaya atau ke PT. Pindad di Bandung,” harap Surahman. Kerja sama lainnya, sambung Surahman, bisa pula dibangun untuk bidang perkeretaapian dan pendidikan. Sebelum terjadi perang saudara di kawasan Balkan, banyak mahasiswa Indonesia menuntut ilmu di Kroasia. Ketika perang berkecamuk, para mahasiswa berpindah haluan studi ke negara Eropa lainnya. (mh)/foto:odjie/parle/hr.

Komponen Penggajian Karyawan Perlu Alokasikan Untuk Perumahan

Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi mengatakan RUU Tapera akan selesai dalam masa persidangan IV ini. Pemerintah sudah sepakat meski tidak sesuai dengan harapan DPR dimana iuran Tapera tidak sampai 5% hanya 2,5%. “Memang kecil, tetapi ini sarana memobilisasi dana, apalagi membangun perumahan perlu dana besar, perlu komitmen yang jelas dan perlu gotong royong semua lapisan masyarakat maupun pemerintah,” katanya menjawab Parlemenaria di Jakarta, Senin (12/5) siang.



Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umarhadi.

Bentuk gotong royong itu misalnya, tanah-tanah yang tidak terpakai, diharapkan bisa membantu untuk dimanfaatkan penyediaan pembangunan rumah. “Terutama BUM N dan Kementerian yang tanahnya terlantar atau tidak dipakai, bisa digunakan untuk dikerjasamakan. Kalau tanahnya harus beli, tidak akan terkejar karena mahal dan para pekerja tidak mampu,” ungkap dia.

Kepada perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan, poli-

tisi PDI Perjuangan ini berharap, salah satu komponen penggajian harus mengalokasikan anggaran untuk perumahan. “Perlu terobosan dan dukungan dari semua, karena Apindo maupun SPSI tidak terlalu yakin. Pemerintah seharusnya yang jadi *leading sector*nya, harus berani mengalokasikan anggaran supaya dipercepat penyediaan rumah. Kalau hanya an-

dalkan gaji karyawan saja, pasti lambat. Pemerintah harus berkontribusi kepada Badan Tapera untuk investasi disitu,” tegasnya.

Dijelaskan Yoseph, minggu ini Pansus akan menyusun jadwal melanjutkan pembahasan RUU Tapera lagi, meski Pilpres sudah menanti. Dia yakin teman-teman anggota DPR sampai akhir

masa bakti akhir September nanti masih akan bertanggungjawab menyelesaikan tugas masing-masing. “Kapan lagi anggota Dewan akan mengukir sejarah, prestasi sehingga di masa tua nanti memiliki kenang-kenangan ikut berkontribusi melahirkan UU Tapera,” pungkas Yoseph. (mp)/foto:eka hindra/parle/hr

Kenaikan TTL Jadi PR Pemerintah Baru

Kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk industri yang diberlakukan tahun ini tentu memukul produktifitas industri nasional. Dampaknya, daya saing industri kian merosot. Apalagi, tahun depan, Indonesia akan berhadapan dengan komunitas ekonomi ASEAN 2015.

“Jujur saya tidak sependapat dengan kenaikan ini. Dulu, hotel-hotel mewah dapat subsidi listrik. Subsidi itu belum dicabut hingga sekarang. Apalagi, industri kecil menengah juga tidak mendapatkan subsidi,” tandas Atte Sugandhi Anggota Komisi VI DPR RI yang dihubungi Selasa (13/5). Kenaikan TTL boleh dikatakan tidak adil.

Menurut Atte, kenaikan TTL akhir-

nya menjadi PR besar bagi pemerintahan baru nanti, agar dunia industri kembali stabil dan punya daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional. Komisi VI DPR, sambung Atte, akan memanggil Dirut PLN untuk meminta klarifikasi dan informasi soal kenaikan TTL ini.

Seperti diketahui, kenaikan listrik industri 38,9% yang diberlakukan secara bertahap sepanjang tahun 2014 ini. Listrik merupakan hal yang cukup dominan dalam mengelola industri. Dampaknya bisa sangat luas. Tidak saja mengurangi daya saing, nilai ekspor juga bisa turun, inflasi meningkat, dan ada pengurangan produksi. Di Korea saja, ungkap Atte, listrik untuk industri disubsidi pemerintah.



Anggota Komisi VI DPR Atte Sugandhi.

Energi alternatif perlu dikembangkan lagi untuk mengganti atau setidaknya mengurangi penggunaan listrik dari PLN. Industri nasional harus terus didorong untuk meningkatkan produktifitasnya dengan energi alternatif. Misalnya, penggunaan biodiesel yang selama ini masih kurang dikembangkan. (mh)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Legislator Janji Hadirkan DPR Yang Lebih Amanah dan Dipercaya Masyarakat



Anggota Komisi I DPR Hidayat Nurwahid.

Di tengah-tengah sorotan tajam akan hasil pileg dimana banyak main politik uang, anggota Komisi I DPR Hi-

dayat Nurwahid menegaskan bahwa DPR sebagai lembaga legislatif, tidak sama dengan jabatan di eksekutif dari Presiden hingga Bupati/walikota. Di eksekutif bisa melakukan banyak hal terkait dengan kebijakan yang langsung bisa dieksekusi di lapangan.

Di DPR tidak demikian, bahkan saat membahas anggaran untuk representasi ditolak. DPR tugasnya terkait dengan pembuatan UU, mengawasi pemerintah dan terlibat penyusunan APBN. Perjuangan untuk konstituen akan dilakukan walaupun tidak sesuai bidang komisinya, tetapi akan dikomunikasikan dengan rekannya di komisi lain.

Selain itu, tandas Hidayat, akan semaksimal mungkin menghadirkan Dewan yang lebih amanah dan lebih dipercaya masyarakat. “Ini adalah isu besar yang akan saya lakukan, bersama rekan-rekan anggota DPR lain, termasuk dengan Pimpinan Fraksi di DPR,” tegas Hidayat Nuwahid kepada pers di Jakarta, Senin (12/5) siang.

Politisi PKS dari Dapil Jakarta II yang terpilih kembali karena memperoleh suara tertinggi di seluruh Jakarta ini mengatakan, yang juga perlu dilakukan anggota Dewan mendatang, jangan menghadirkan sesuatu yang membuat rakyat kecewa, misalnya sering membolos. “Kami akan ingat-

kan, penting sekali untuk menjawab kegalauan publik itu dengan hadir di persidangan. Juga soal produktifitas pembuatan UU, perlu didorong untuk rajin dan aktif membahas RUU meski DPR dalam penyusunan RUU bekerja sama dengan pemerintah,” katanya.

Dalam pembahasan RUU ujar Hidayat, meski para anggota sudah rajin, tetapi pemerintah malas bahkan memboikot, maka tidak akan selesai. Jadi kata kuncinya, menurut mantan Presiden PKS ini, hadirkan DPR yang bisa dipercaya masyarakat dan tidak mengulang apa-apa yang menjadi kritik masyarakat.

Saat ditanya, DPR yang terpilih kali ini ditengarai banyak main politik uang, Hidayat menegaskan, hal itu tesaerah kepada yang memilih. Ibaratnya tidak mungkin caleg bertepuk sebelah tangan, kalau tidak ada yang minta berarti tidak ada yang memberi. Jadi katanya, pertanyaan ini juga perlu disampaikan kepada para pemilih. “Kesalahannya dilempar ke DPR, tetapi mekanisme pemilihan juga harus dikritisi serta sistem pemilu harus dikoreksi,” ungkap dia.

Dia menambahkan, salah satu permasalahan besar sistem pileg lalu punya saham hadirnya pemilu yang paling amburadul dan paling tidak berkualitas. Saat pembuatan UU Pemi-

lu, Hidayat menegaskan jangan sistem sekarang ini. Kekhawatiran ini diharapkan bisa dijawab oleh kawan-kawan anggota DPR yang disebut “mengkhawatirkan” itu dengan membuktikan bahwa DPR periode 2014-2019 bisa lebih bermartabat karena dipilih dengan cara yang bermartabat pula.

“Kalaupun ada yang terlanjur memberi uang dan tidak ketahuan, sudahlah itu semua dijawab dengan kinerja yang bagus. Buktikan bahwa anda terpilih karena layak untuk menjadi wakil rakyat. Jadikan anda sebagai obat atas kegalauan masyarakat itu,” pesan Hidayat Nurwahid. (mp)/foto: iwan armanias/parle/hr.

60 Bidan PTT Diterima Pimpinan DPR

Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka meminta Pimpinan Dewan memberikan perhatian khusus terhadap nasib bidan PTT di seluruh Indonesia yang terkatung-katung pasca keluarnya Permenkes No 7 tahun 2013 tentang pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap.

“Kita baru menerima Bidan PTT dari seluruh Indonesia yang pada intinya memohon bantuan dari pimpinan Dewan karena adanya peraturan Pemerintah baik berupa Kepres, Perpres, maupun Menteri mengancam status kerja mereka yang sudah bekerja selama 9 tahun ini,” ujarnya dalam rapat Paripurna, Senin Siang, (13/5).

Menurutnya, Bidan memegang kunci keberhasilan penurunan kematian ibu dan bayi, karena itu harus menjadi perhatian bersama dari anggota Dewan. “Kita memiliki PR konstitusional yang kita emban pertama mengenai Tenaga kerja *outsourcing* BUMN kita juga mohon bantuan dari hasil rekomendasi sidang tanggal 12 Mei batas akhir penyelesaian tenaga *outsourcing* BUMN harus sudah keluar,” terangnya.

Dia menambahkan, berdasarkan UU, seharusnya tenaga kerja yang bekerja pada *core* bisnis tidak seharusnya berstatus *outsourcing*. “Kita meminta bantuan kepada Pimpinan dorong kepada pemerintah sepakati hasil ber-



Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka.

sama ini,” jelasnya.

Sebelum rapat paripurna dimulai, 60 Bidan pegawai tidak tetap (PTT) perwakilan dari 32 provinsi mendatangi DPR RI. Setelah diterima oleh Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning, mereka mengikuti rapat paripurna dan setelah itu dengan didampingi oleh Rieke Dyah Pitaloka, beraudiensi dengan pimpinan DPR RI, Pramono Anung.

Kedatangan para Bidan PTT tersebut terkait diskriminasi yang diterima oleh Bidan PTT akibat Permenkes No 7 tahun 2013 tentang pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap. Adapun point-point yang disampaikan : pertama, terkait pembatasan masa bakti Bidan PTT yang akan berakhir Juli 2014. Setelah itu mereka bisa menjadi Bidan PTT kembali dengan tidak ada penghitungan masa kerja. Masa kerja dihitung kembali 0 tahun.

Padahal mayoritas Bidan PTT tersebut masa kerjanya sudah 9 tahun. Para Bidan PTT menginginkan status kerja yang jelas, mengingat masa bakti yang sudah sekian lama, pemerintah seharusnya memprioritaskan para Bidan PTT dalam rekrutmen PNS secara otomatis, melalui jalur khusus dan tanpa pungutan biaya apapun. Kedua, cuti melahirkan yang seharusnya pada aturan terkait selama tiga bulan, bagi Bidan PTT hanya diberi cuti 40 hari kalender setelah melaksanakan tugas selama satu tahun berturut-turut. Artinya, jika kurang dari masa kerja tersebut tidak mendapatkan cuti melahirkan.

Tindakan diskriminatif lain yang diterima Bidan PTT adalah terkait indikasi “pelarangan Bidan PTT yang masih melaksanakan masa bakti melanjutkan pendidikan”. Alasannya, mereka tidak boleh meninggalkan tempat tugas. Di sisi lain syarat untuk mendapatkan ijin praktek minimal harus berijazah D3, sementara masih banyak Bidan PTT berpendidikan D1. Sehingga apabila status PTT dicabut, maka mereka pun tidak bisa membuka praktek mandiri.

Rieke menegaskan, dirinya mendukung agar Permenkes 07 tahun 2013 dan induknya, yaitu Kepres No. 77 tahun 2000 dicabut dan diganti dengan aturan baru yang lebih memberikan jaminan pada status kerja dan pemberian hak-hak Bidan PTT sebagai Tenaga Kesehatan. (si)/foto:odjie/parle/hr.



UN SMP dan SMA Harus Dihapuskan



Anggota Komisi X DPR Itet Tridjajati Sumarijanto.

Pro Kontra Penghapusan penyelenggaraan UN marak kembali, anggota DPR dari PDIP Itet Tridjajati Sumarijanto menegaskan, Ujian Nasional (UN) harus dihapuskan baik pada tingkat SMP maupun SMA. “Karena UN ini menelan biaya yang sangat mahal, selain itu mengukur siswa tidak hanya angka semata perlu juga dilihat kemampuan sosial mereka,” ujarnya kepada Parlemen, Selasa, (13/5).

Menurutnya, penilaian kuantitatif dengan angka tidak bisa dijadikan patokan bisa saja anak didik itu mendapatkan dengan cara menyontek. “Kenapa setelah lulus SMA saat masuk universitas harus dites lagi,” jelasnya.

Melalui cara ini, lanjutnya, dapat menciptakan keseimbangan antara aspek kognitif dan motorik. “Kalau di negara barat tidak hanya menilai kognitifnya saja, tetapi kegiatan sosialnya itu dimasukkan kedalam penilaiannya,” katanya.

Dia mengatakan, perlu ada revolusi pendidikan dengan menciptakan pondasi yang ideal bagi dunia pendidikan. “Jadi harus memiliki tujuan yang jelas, misal tamatan SD, SMP, SMA bisa jadi apa, artinya outputnya ada,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah juga harus mengetahui kebutuhan pendidikan di pedesaan dengan membuat satu pola tertentu. “Salah satu usulan saya yaitu dengan membuat SD Kejuruan, ini kita perlu melakukan revolusi,” tegasnya.

Dia mengatakan, untuk anak-anak sekolah yang terpicil dengan infrastruktur yang buruk, perlu diberikan ketrampilan sejak kecil. “Begitu tamat SD anak-anak harus tahu potensi daerah pesisir laut, dan daratan, misal bagaimana menangkap ikan dan bercocok tanam,” ujarnya.

Berikutnya, jelas Itet, perlu adanya peningkatan budaya baca dan peningkatan budaya penelitian bagi siswa/i di Indonesia. Dari kecil pada tingkat Sekolah Dasar perlu didorong minat budaya baca bagi para pelajar Indonesia.

Dia menambahkan, Badan Perpustakaan secara fungsional memang dibawah Kemendikbud namun faktanya minim perhatian dari Kementerian tersebut.

Terkait guru, lanjut Itet, tidak hanya diberikan sertifikasi semata artinya perlu ada pengayaan intelektual. Para guru tidak pernah melakukan pembelajaran termasuk belajar komparatif dengan negara lain.

Berikutnya perlu didorong terciptanya data pendidikan yang komprehensif seperti membentuk semacam *centre education*, dengan cara ini pelajar SMA yang akan lulus jadi tahu minat dan tujuannya kemana, selain itu perlu adanya kerjasama lintas sektoral dengan perusahaan yang ingin merekrut tenaga kerja siap pakai.

Hal berikutnya yang tidak kalah penting, lanjut itet, memberlakukan sekolah negeri gratis. “Penyelenggara pendidikan hanya satu pintu dan bertanggung jawab terhadap seluruh anggaran yang 20 persen dialokasikan kepada Kemendikbud. Artinya anggaran pendidikan jangan dibagi ke 18 Kementerian atau lembaga,” katanya.

Dia menambahkan, dari hampir Rp 499 Triliun Kemendikbud hanya menggunakan Rp70 Triliun sementara sisanya dibagi-bagi. “Yang terbesar yaitu Kemenag sekitar Rp35 Triliun,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Perhatikan Kebijakan Akuisisi BTN

Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Mandiri bisa dipastikan batal. Hal ini menyusul setelah Presiden mengirimkan surat permintaan penundaan akuisisi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, Direktur Utama PT BTN, serta Dirut PT Bank

Mandiri.

Penundaan ini dikarenakan rencana akuisisi ini berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat dan karyawan BTN. Selain itu, hal ini juga dapat menimbulkan beban bagi pemerintah mendatang sebab prosesnya yang panjang.

“Dewan memberikan perhatian terhadap kebijakan penundaan yang disampaikan oleh Presiden. DPR menekankan bahwa, rencana pelepasan saham BTN harus memperoleh persetujuan DPR,” jelas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat membacakan pidato pembukaan masa persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Senin (12/05).



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, apalagi *core business* BTN berbeda dengan *core business* Bank Mandiri. Bank BTN pada awalnya memang didirikan untuk membantu mendanai sektor perumahan atau *property*.

“Akuisisi BTN ini direncanakan akan dilaksanakan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), namun memperoleh resistensi terutama dari kalangan Serikat Pekerja

BTN,” tambah Pram, sapaan akrab Pramono.

Sebagaimana pemberitaan di berbagai media, rencana akuisisi membuat sebagian karyawan BTN resah. Perampingan karyawan menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan mereka. Sejumlah unjuk rasa pun dilakukan oleh serikat karyawan bank pemerintah yang terkenal dengan kredit perumahan itu. (sf)/foto:andri/parle/iw.

Komisi II Akan Panggil KPU dan Bawaslu

Ketua Komisi II DPR, Agun Gunanjar Sudarsa akan segera panggil KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) terkait dugaan adanya pelanggaran pada penyelenggaraan pemilu legislatif 9 April lalu. Hal tersebut diungkapkannya usai sidang paripurna pembukaan masa sidang IV tahun 2013-2014, Senin (12/5).

“Kita akan panggil KPU dan Bawaslu terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu. Dan jika ternyata ada indikasi kuat keduanya lalai menjalankan tugasnya kita akan rekomendasikan agar mereka diganti,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

Ditambahkannya, pihaknya juga akan merekomendasikan agar sejumlah komisioner KPU di beberapa daerah dipecat jika terbukti ikut terlibat melakukan pelanggaran dalam pemilu

yang lalu. Agun berjanji proses evaluasi penyelenggaraan Pileg kemarin dengan memanggil KPU dan Bawaslu tidak akan lebih dari dua minggu ke depan. Dengan demikian pemanggilan tersebut diyakininya tidak akan mengganggu pilpres (pemilihan presiden) Juli mendatang.

Sebagaimana diketahui dalam pembukaan masa sidang ke-IV ini, beberapa anggota sempat mengutarakan kekecewaannya terhadap penyelenggaraan pemilu legislatif. Rekan separtai Agun dari Fraksi Golkar, Nurdiman Munir misalnya, ia mengungkapkan bahwa penyelewengan pileg 2014 kemarin dilakukan secara massif, sistematis, dan terstruktur oleh oknum penyelenggara pemilu. Bahkan Wakil Ketua DPR RI, Sohibul Iman juga menilai penyelenggaraan Pileg 2014 sangat luar biasa dan karut marut di lapangan.



Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa.

Selasa (13/5) dini hari tadi MK (Mahkamah Konstitusi) telah menutup pendaftaran sengketa Pileg. Menurut Sekjen MK, Janedri yang dilansir dari berbagai media massa, hingga pukul Senin (12/5) pukul 23.51 WIB, MK menerima pengajuan sengketa Pileg dari 14 Partai yang terdiri 12 Partai Nasional dan 2 Partai Lokal. (Ayu)/foto:odjie/parle/hr.

Publik Perlu Beri Energi Positif pada MK



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi.

Kekhawatiran publik Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan profesional dan berlaku adil dalam menyelesaikan sengketa pemilu legislatif dapat dimaklumi. Publik tentu masih mengingat kasus sengketa pilkada yang putusannya bisa diatur oleh M. Akil Mochtar, ketua MK waktu itu.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Tjatur Sapto Edi menilai langkah yang dapat dilakukan dalam kondisi ini adalah masyarakat memberikan energi positif pada MK. Konstitusi dan aturan perundang-undangan yang ada masih memberikan kewenangan kepada lembaga negara ini.



“Sangat bisa dimaklumi kalau ada kekhawatiran publik MK tidak profesional, tidak bisa menjadi pengadil. Tapi menurut saya dalam kondisi saat ini yang paling penting adalah masyarakat bersama memberikan energi positif kepada MK sesuai aturan yang ada,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/5/14).

Energi positif itu menurutnya bisa dalam bentuk dorongan untuk bekerja lebih profesional, mengawasi, mendoakan sehingga 9 Hakim Konstitusi tidak melenceng dalam menjalankan tugasnya. Ia secara khusus memberikan apresiasi MK telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyelesaikan perkara pemilu dengan cepat.

“Langkah MK untuk membentuk 3 tim saya rasa bagus, sistem sudah ada tinggal dijalankan dengan baik. Kondisinya cukup berat sengketa antar partai bahkan sesama caleg satu partai,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI ini.

MK telah menetapkan akan memulai sidang perdana gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif 23/5 yang akan datang. Seluruh partai peserta pemilu kecuali Partai Aceh yang telah mendaftarkan gugatan diminta sudah melengkapi berkas sebelum sidang dilaksanakan. (iky)/foto:odjie/parle/hr.

Penyelenggaraan Pemilu 2014 Karut Marut

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman menilai penyelenggaraan Pemilu 2014 sangat luar biasa dan karut marut di lapangan. “Ada yang mengibaratkan brutal dan sadis, bahkan Nurul Arifin mengibaratkan lebih dahsyat daripada perang Suriah,” jelasnya saat membuka *press gathering* DPR RI-Wartawan di Bali, (10/5).

Menurutnya, statement Nurul Arifin bisa juga sangat subjektif namun faktanya memang luar biasa karut marut penyelenggaraan politik kali ini. “Misalnya saat kita mencari form C1 saja susah sekali, dari Pemilu lalu PKS memang jadi tumpuan dari Parpol lain yang bersengketa karena memang Kader PKS sangat



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

militan di lapangan,” katanya.

Dia mengemukakan, maraknya penyelewengan di lapangan dan diduga melibatkan penyelenggara pemilu.

“Bahkan di lapangan penyelenggara pemilu banyak memperdagangkan kekuasaannya. Banyak caleg diajak bicara untuk mengamankan bahkan Ketua PPK mengontak saya menawarkan agar menjaga suara,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dirinya percaya terhadap dua hal pertama yaitu hati nurani masyarakat. Artinya kita tidak boleh menggeneralisir masyarakat hanya uang semata. Berikutnya kita serahkan kepada Tuhan. “Dengan kondisi seperti ini sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia kedepannya. Kita harus bekerjasama mengkokohkan pilar demokrasi dan membangun demokrasi,” jelasnya. (si)/foto:iwan armanias/parle/iv.

Pembubaran Parlemen Berdampak Penundaan Pembentukan Gopac Thailand



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Terkait dengan kegiatan diplomasi parlemen, *Presiden SEAPAC (Southeast Asian Parliamentarians Against Corruption)*, DPR telah menyampaikan keprihatinannya terhadap situasi politik yang terjadi di Thailand. Pembubaran Parlemen Thailand telah berdampak pada terjadinya penundaan Pembentukan Gugus Tugas Nasional Anti-Korupsi atau GOPAC (*Global Organization Parliamentarians Against Corruption*) Thailand.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung dalam rapat paripur-

na pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2013-2014 di Gedung Nusantara II DPR Senayan Jakarta Senin (12/5) pagi.

Melihat pada dinamika yang terjadi, DPR berharap Thailand segera menemukan titik cerah dan dapat membentuk parlemen yang baru, dalam upaya bersama melakukan pemberantasan korupsi di kawasan dalam kerangka SEAPAC.

Pramono Anung mengatakan, DPR telah mengirimkan delegasi untuk



menghadiri *The Second World e-Parliament Conference* yang dilaksanakan di Majelis Nasional Republik Korea, Seoul pada tanggal 8-10 Mei yang lalu. Melalui konferensi yang bertema “*Lessons Leamed and Future Horizon*” ini, Dewan dapat saling bertukar pengalaman dan membangun kerjasama antar parlemen dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

DPR juga telah mengirim Delegasi ke *Preparatory Meeting* dan ASEAN

Leaders Meeting with ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Representatives pada tanggal 11 Mei 2014 di Nay Pyi Taw, Myanmar, yang dilaksanakan di sela-sela KTT ASEAN ke 24.

Di bagian lain, Pramono mengatakan, DPR akan menjadi tuan rumah Sidang APA *Standing Committee on Economic and Sustainable Development* pada tanggal 2-5 Juni 2014 di Jakarta, yang mengangkat tema “*Alleviating Poverty Through the Implementation of*

Sustainable Development”.

Sidang akan membahas permasalahan yang menjadi perhatian bersama dari negara-negara anggota APA terkait isu-isu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta pembahasan usulan empat draft resolusi dari Sekretariat APA. Sidang ini memiliki arti penting bagi DPR, karena menunjukkan peran Indonesia sebagai salah satu pemimpin Asia dalam bidang ekonomi. (Spy)/foto:eka hindra/parle/hr.

Banyak Anggota Dewan Yang Bagus dan Berintegritas

Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, banyak sekali dari 560 anggota Dewan yang bagus-bagus dan punya integritas membangun bangsa. Banyak anggota Dewan yang giat bekerja melaksanakan tugasnya seperti pembahasan RUU dari pagi sampai pagi lagi.

Demikian ditegaskan Win, panggilan akrab Sekjen DPR, pada acara *Press Gathering* di Bali Jumat pekan lalu. Menurutnya, dirinya mendapat “titipan” dari bapak-ibu anggota yang tidak akan mengabdikan lagi di Senayan, agar dijelaskan kepada pers dan LSM, jangan dianggap gagal lagi menjadi anggota DPR karena dihukum masyarakat. “Mereka telah bekerja keras melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anggota DPR, tetapi gagal karena maraknya politik uang,” katanya.

Dalam kaitan itu, lanjut Win, pihaknya akan menggelar acara dengan menghadirkan sekitar 30 LSM untuk diberikan pemahaman masalah tersebut. Demikian pula kepada rekan-rekan wartawan, diharapkan menjadi jembatan informasi yang disampaikan



Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti

kepada masyarakat.

“Tidak hanya berita sensasional, tetapi kerja positif DPR juga perlu disiarkan dan menjadi informasi positif di masyarakat,” ujarnya dengan berharap pertemuan dengan wartawan Koordinatoriat DPR ini membawa manfaat bagi tugas-tugas DPR ke depan.

Pada bagian lain, Sekjen DPR menginformasikan bahwa DPR periode 2009-2014 akan memulai tugasnya pada Senin (12/5) dan direncanakan masa persidangan keempat tahun 2013-2014

akan berlangsung sampai 10 Juli 2014. Namun karena pemilu presiden (pilpres) berlangsung pada tanggal 9 Juli, maka masa persidangan IV akan diu-sulkan dipersingkat sekitar sepekan.

Meski demikian, kegiatan DPR sangat banyak terutama terkait dengan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015, Laporan Semester dan rencananya Pemerintah juga akan menyampaikan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro. Dari sisi legislasi, DPR masih punya pekerjaan rumah (PR) menyelesaikan 133 RUU. Tetapi dari 133 RUU ini 91 diantaranya adalah RUU Pemekaran Daerah.

Setelah itu, kata Win, akan digelar pilpres dan menjelang Oktober, Setjen DPR mempersiapkan pelantikan anggota DPR baru. “Saya mengajak teman-teman wartawan untuk berperan menjadi jembatan. Kalau kami lari-lari bersama anggota, para wartawan menjadi jembatan ke masyarakat bahwa banyak sekali pekerjaan dan tugas yang dilalukan oleh anggota DPR,” ungkap Win menambahkan. (mp)/foto:iwan armanias/parle/iw.

Keakraban Dijaga, Fungsi Kontrol Pers Ditingkatkan

Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengharapkan, *pers gathering* antara DPR RI-Wartawan semakin baik dan erat. Sementara kebersamaan dan keakraban jangan sampai menghilangkan fungsi kontrol yang dimiliki oleh media massa.

“Pers merupakan pilar keempat demokrasi, dalam hal kerja profesionalisme kita harus jaga jarak jadi bisa leluasa menjalankan fungsinya masing-masing,” ujar Pimpinan dewan bidang Korekku ini saat membuka *press gathering*



wartawan DPR RI-Wartawan di Bali,(10/5).

Menurutnya, dari sisi kemanusiaan memang tidak boleh mengambil jarak karena memang dari sisi itulah keakraban antar manusia bisa saling tercipta. “Kami dengan eksekutif juga tidak boleh terlalu dekat jadi harus berjarak agar bisa mengembangkan fungsi kontrol. Namun disisi lain, sebagai manusia harus mengembangkan keakraban,” jelasnya.

Dia mengatakan, banyak tokoh negarawan bangsa ini ketika berdebat di parlemen sedemikian hebat namun saat diluar mereka tetap saling mengunjungi dan bersilahturahmi. “Sekali lagi kami mengingatkan hubungan kami dengan



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman.

wartawan jangan sampai menghilangkan fungsi kontrol,” katanya.

Sementara Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti mengatakan, pada masa sidang ini DPR memiliki Kegiatan yang cukup padat di akhir masa jabatan nanti “Diantaranya kita akan melakukan pembicaraan pendahuluan APBN, dari 123 RUU, hampir 91 UU diantaranya RUU Pemekaran Daerah,” katanya.

Dia menambahkan, banyak tamu DPRD hampir dari seluruh Indonesia saat berdialog mereka mengajukan rencana pemekaran bahkan disertai sedikit ancaman. “Ini juga merupakan tantangan yang dihadapi oleh anggota di masa mendatang,” jelasnya. (si) foto:odjie/parle/hr.

Kalangan DPR Akan Jaga Komitmen Hingga Akhir Masa Bakti

Kalangan DPR menyatakan akan tetap menjaga komitmen melaksanakan tugas hingga akhir masa bakti tanggal 30 September 2014. Mereka akan tetap melaksanakan tugas seperti pembahasan RUU, pengawasan dan penyusunan anggaran. “Meski tidak terpilih lagi, saya tetap komitmen melaksanakan tugas pembahasan RUU Pemda dan RUU lainnya,” kata Rahadi Zakaria petahana dari Fraksi PDI Perjuangan menjawab Parle Senin (12/5), yang kali ini tidak lolos pada pileg April lalu.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Sutan Bhatoegana juga menyampaikan sikap senada. Menurutnya, meski kemungkinan tidak terpilih lagi sebagai anggota Dewan, tetapi perjuangannya tidak hanya di DPR. “Saya akan tetap aktif di pengurus partai dan bergabung kembali dengan teman-teman di perusahaan,” ungkapnya.

Ia akan tetap berkomitmen melaksanakan tugas termasuk menghadiri Sidang-sidang paripurna, sidang komisi dan pembahasan RUU. Mengenai RUU yang belum selesai, Sutan mengatakan tugas Komisi VII dalam pembahasan RUU sudah diselesaikan, sedangkan revisi UU Migas sudah di tingkat Baleg.

Kedua anggota Dewan mengemukakan hal itu menanggapi penegasan Ronald Rofiandri selaku Direktur Monitoring, Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, agar anggota Dewan yang terpilih dan tidak terpilih dituntut untuk menjaga komitmen hingga akhir masa bakti. Anggota Dewan selain terikat dengan sumpah jabatan, juga masih terikat dengan hak keuangan dan administratif atau masih mendapat gaji dan tunjangan lainnya.



Anggota DPR Rahadi Zakaria, Yoseph Umarhadi sedang berdialog.

Sementara anggota FPKS Hidayat Nurwahid yang terpilih kembali menjadi anggota Dewan menyatakan akan melanjutkan tugas terutama menyangkut tiga fungsi legislasi, pengawasan dan penyusunan APBN. Ia akan semaksimal mungkin mengembalikan Dewan yang lebih amanah dan mendapat kepercayaan masyarakat. “Saya juga akan mendorong anggota Dewan tetap aktif, rajin dan terlibat dalam pembahasan legislasi,” tambah mantan Presiden PKS ini.

Anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan yang terpilih kembali Yoseph Umar Hadi menyatakan sikap yang sama, akan mengabdikan dirinya hingga akhir masa jabatan September. Bahkan selaku Ketua Pansus RUU Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat) ia bertekad menyelesaikan RUU yang misinya membantu masyarakat khususnya masyarakat kecil dan menengah bisa memiliki rumah. “Ini akan kami perjuang sebagai hadiah atau kenang-kenangan persembahkan DPR masa bakti 2009-2014,” pungkas Yoseph. (mp) foto:eka hindra/parle/hr.

Kasus Kekerasan dan Kejahatan Terhadap Anak Memprihatinkan

Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa tempat, cukup mengagetkan dan memprihatinkan, terlebih kasus ini terjadi di dalam lingkungan sekolah, yaitu Jakarta International School. “Hal ini harus menjadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, saat Rapat Paripurna DPR, Senin (12/5) di Gedung Parlemen Jakarta.

Harus diakui, kata Pramono, kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak semakin hari semakin memprihatinkan. Kasus kekerasan terhadap anak, penculikan anak, kekerasan seksual pada anak, anak korban KDRT, *bullying*, menjadi pemberitaan luas di media massa.

Ini menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk, semakin meningkat. Padahal, Pramono Anung menjelaskan dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang sudah ada, negara telah menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Akan tetapi, menurutnya, implementasi UU ini belum sepenuhnya menjamin hak-hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas Anak, harus bisa meminimalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut.

“Dewan meminta perhatian semua pihak terutama Pemerintah, agar melakukan langkah konkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa,” katanya.

Untuk itu Dewan meminta Presiden supaya melakukan gerakan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecer-



Pimpinan DPR RI dalam Sidang Paripurna DPR RI.

dasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicerai oleh kekerasan.

Dewan sepenuhnya mendukung usulan KPAI, agar dilakukan pencanangan “Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan terhadap Anak Indonesia,”.

Di samping kekerasan terhadap anak, kekerasan yang terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang mengakibatkan kematian mahasiswanya, juga memprihatinkan kita. Menurut Pramono, kejadian ini sangat kita sesalkan, karena peristiwa ini berulang kembali di beberapa institut atau perguruan tinggi kedinasan beberapa tahun ini. Pembinaan terhadap mahasiswa baru seringkali membawa korban yang berujung kematian.

“Pembinaan dalam konteks pendidikan, seharusnya jauh dari tindakan kekerasan fisik, tetapi lebih berorientasi kepada pengenalan kampus, berupa kegiatan akademis,” katanya. (As)/foto:odjie/parle/hr.

DPR RI Bahas 106 RUU

Dalam Masa Persidangan IV di masa akhir jabatan DPR RI akan melanjutkan pembahasan 106 RUU yang sudah memasuki Pembicaraan tingkat I.

“Sebanyak 106 RUU, yaitu 33 RUU Prioritas, dan 73 RUU Kumulatif terbuka,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung saat membuka masa persidangan IV, di Gedung Nusantara II, Senin, (12/5).

Dia mengatakan, RUU Prioritas

ditangani oleh hampir seluruh Komisi-Komisi DPR dan Panitia-Panitia Khusus, di antaranya adalah RUU tentang Perjanjian Internasional, RUU tentang Pilkada, RUU tentang Pertanahan, RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Hukum Acara Pidana.

Adapun RUU yang ditangani Pansus, lanjutnya, antara lain RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (Perubahan Atas UU No.

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri), RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, RUU tentang Kepalaangmerahan, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta masih banyak RUU lainnya.



Selanjutnya, papar Pramono, RUU Kumulatif Terbuka yang ditangani, di antaranya adalah RUU tentang Pembentukan Otonom Baru sebanyak 65 (enam puluh lima) serta 4 (empat) RUU Kumulatif Terbuka berkaitan dengan Pengesahan Perjanjian Internasional.

Sejumlah 4 (empat) RUU Daerah Otonomi Baru yang akan segera tuntas karena telah mengalami beberapa kali masa perpanjangan adalah, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, RUU tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RUU tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dia menambahkan, DPR-RI masih akan menyelesaikan penyusunan dan perumusan 21 (duapuluh satu) RUU baru, diantaranya RUU tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, RUU Perubahan Atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, RUU tentang Pengelolaan Ibadah Haji, dan lain-lain.

Dia mengatakan, DPR harus memiliki tekad yang kuat dan tulus untuk benar-benar menyelesaikan berbagai RUU, khususnya yang sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, dimana berbagai



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menyampaikan pidato.

produk perundang-undangan tersebut sudah amat dinantikan masyarakat.

“Hal ini penting, karena berbagai UU itu akan menjadi payung hukum dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjadi tanggung jawab pemerintahan baru yang akan datang. Oleh karenanya, berbagai kendala dalam setiap pembahasan RUU, baik yang bersifat substantif ataupun yang bersifat koordinatif, harus diminimalisasi,” terangnya.

Melalui forum ini, kita mengharapkan Pemerintah memiliki semangat yang sama dalam menyelesaikan berbagai RUU yang telah masuk di dalam program prioritas untuk tahun 2014, karena penyelesaian RUU merupakan tanggung jawab bersama antara De-

wan dan Pemerintah.

Untuk RUU pembentukan daerah otonom baru, baik provinsi maupun kabupaten/kota, Pimpinan Dewan mengharapkan dalam pembahasannya, perlu menunggu evaluasi dan kajian menyeluruh yang dilakukan oleh Pemerintah.

Sehingga, lanjutnya, hanya daerah-daerah yang benar-benar memenuhi syarat pemekaran, dengan mempertimbangkan urgensi dan kepentingan nasional, serta memperhatikan PP No. 78 tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, yang dapat dimekarkan.”Pembentukan daerah otonom baru ini harus diarahkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat,” harapnya. (si)/foto:eka hindra/parle/hr.

DPR Minta Pemerintah Susun Langkah Konkret Lindungi Anak Indonesia

Dewan meminta perhatian semua pihak terutama Pemerintah, agar melakukan langkah konkret, terstruktur dan terprogram, untuk melakukan perlindungan pada anak Indonesia sebagai generasi penerus bangsa.

“Kita minta Presiden untuk melakukan gerakan penghentian semua bentuk kekerasan terhadap anak, agar lahir generasi masa depan yang memiliki kecerdasan akhlak dan pribadi yang utuh tanpa dicerai oleh kekerasan,” ujar Wakil Ketua DPR Pramono Anung, saat membuka masa persidangan IV, Senin, (12/5).

Pramono mengatakan, Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di beberapa tempat, cukup mengagetkan dan memprihatinkan kita, terlebih kasus ini terjadi di dalam lingkungan sekolah, yaitu Jakarta International School. “Hal ini harus menjadi pengalaman pahit yang tidak boleh terulang dan tidak boleh terjadi lagi,” katanya.

Harus kita akui, paparnya, kasus-kasus kekerasan dan kejahatan terhadap anak semakin hari semakin memprihatinkan. “Kita tahu, kasus kekerasan terhadap anak, penculikan anak, kekerasan seksual pada anak,



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

anak korban KDRT, *bullying*, menjadi pemberitaan luas di media massa. Ini menunjukkan bahwa kejahatan dan kekerasan terhadap anak dengan berbagai bentuk, semakin meningkat,” jelasnya.

Padahal, katanya, dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan

yang sudah ada, negara telah menjamin dan melindungi hak-hak anak, seperti tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi, jelas Pramono, implementasi UU ini belum sepenuhnya menjamin hak-hak anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) dan Komnas Anak, harus bisa meminimalisasi terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut.

DPR, terangnya, mendukung usulan KPAI, agar dilakukan penancangan “Gerakan Nasional Stop Kekejaman dan Kekerasan terhadap Anak Indonesia.”. (si)/foto:iwan armanias/parle/hr.

DPR Berkomitmen Tuntaskan Pelaksanaan Fungsi Pengawasan



Suasana Sidang Paripurna.

DPR yang membentuk Tim Pengawas Tindak Lanjut Rekomendasi Panitia Angket tetap berkomitmen untuk menuntaskan pelaksanaan fungsi pengawasan. Tim Pengawas tentang Kasus Bank Century, Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria, dan Tim Pengawas terhadap Perlindungan TKI di Luar Negeri.

“Tim-Tim tersebut diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya pada Masa Persidangan IV ini,” tandas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, dalam Pidato Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, Senin (12/5).

Menurut Pramono, pada Masa Per-

sidangan I Tahun Sidang 2014-2015, DPR-RI akan fokus pada penyelesaian fungsi legislasi, pembahasan dan penyelesaian RUU APBN 2015.

Sementara itu, Panja-Panja Komisi tetap harus melanjutkan tugasnya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah, antara lain, Panja BPJS, Panja Kesehatan Haji, Panja Pekerja Sosial dan Panja Bantuan Siswa Miskin.

Perlindungan TKI

Khusus perlindungan TKI di luar negeri, Pramono Anung Menegaskan Dewan menghendaki agar amandemen UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, benar-benar mampu memperbaiki sistem rekrutmen dan memperketat pengawasan agar kasus-kasus hukum yang menimpa TKI, tidak

berulang kembali.

Pemantauan Tim Pengawas TKI menemukan beberapa masalah pokok, baik yang dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum maupun pada saat kunjungan ke luar negeri.

Pramono Anung menyimpulkan bahwa permasalahan dalam kebijakan penempatan dan perlindungan TKI merupakan masalah nasional yang menyangkut harkat dan martabat bangsa, sangat kompleks dan bersifat *cross culting* sektoral.

Permasalahan TKI sudah muncul sejak pra-penempatan, penempatan dan purna-penempatan, sebagian besar permasalahan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI bersumber di dalam negeri, dan melibatkan 21 (dua puluh satu) kementerian/lembaga dan badan.

“Dalam pelaksanaannya, masing-masing Kementerian/Lembaga dan Badan masih cenderung mengedepankan ego-sektoral, berjalan sendiri-sendiri dan tidak terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Tim Pengawas TKI telah melakukan kunjungan kerja ke Hongkong dan Korea Selatan dalam rangka memantau perlindungan TKI. Di Hongkong, Pramono mengatakan Tim mengusulkan hak beribadah dimasukkan dalam klausul kontrak kerja. Di Korea Selatan, kesejahteraan TKI secara umum lebih baik dan lebih terjamin, meskipun perlu diantisipasi masalah *overstay*, kuota, dan masa kontrak di negara ini. (As)/foto:odjie/parle/hr.

DPR Bicarakan Pendahuluan RAPBN 2015

DPR bersama dengan Pemerintah akan membahas dan menyetujui kebijakan umum dan prioritas anggaran, sebagai acuan bagi setiap Kementerian dan Lembaga dalam menyusun usulan anggarannya. DPR RI pada Masa Persidangan IV salah satu prioritasnya adalah membahas Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2015 sebagai pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI.

“Pembicaraan Pendahuluan memiliki peran yang sangat strategis, karena berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal,” kata Wakil Ketua Pramono Anung, pada Rapat Paripurna DPR Pembukaan Masa Persidangan ke IV tahun 2013-2014, Senin (12/5), di Gedung Parlemen, Jakarta.

Pramono Anung menyampaikan bahwa Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2015, akan diawali dengan penyampaian Pokok-pokok Kebijakan Fiskal dan Ekonomi Makro.

“Dalam kerangka Pembicaraan Pendahuluan ini, selain akan membahas besaran asumsi ekonomi makro, kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan defisit, Dewan akan membahas Rencana Kerja Pemerintah 2015 sebagai pedoman untuk menyusun APBN,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Dijelaskan Pramono Anung bahwa RAPBN 2015 merupakan APBN transisi atau APBN tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ketiga tahun 2015-2019, sekaligus pelaksanaan tahun pertama pemerintahan baru.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Pramono Anung menegaskan Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya, diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah



Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan IV.

(RKP) untuk tahun pertama periode pemerintahan presiden berikutnya.

Sementara itu, presiden terpilih periode berikutnya, tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan Rencana Kerja Pemerintah dan APBN pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan APBN (APBN-Perubahan).

Oleh karena itu, kata Pramono Anung, APBN yang akan diajukan oleh Pemerintah bersifat *base line*, yaitu hanya memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, belum memperhitungkan inisiatif-inisiatif baru.

Selain itu, menurut Pramono, hal-hal yang membebani APBN seperti BBM dan kebijakan lain yang tidak mendukung, harus menjadi perhatian bersama. Seperti diketahui, subsidi BBM tiap tahun terus meningkat dan membebani APBN. “Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang tepat dan komprehensif, ini menjadi tanggungjawab DPR dan Pemerintah yang akan datang,” tegasnya. (As)/foto:iwan armanias/parle/hr.

DPR Ingin Pilpres Berjalan Aman

Saat ini, bangsa Indonesia, bersiap menyongsong agenda politik berikutnya, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung pada tanggal 9 Juli 2014. DPR RI mengharapkan Pemilihan Presiden (Pilpres) berjalan sukses.

“DPR berharap, agenda Pilpres dapat berjalan dengan sukses, aman dan lancar, sekaligus akan menghasilkan pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa Indonesia untuk kurun lima tahun ke depan,” kata Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, dalam Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014, di Gedung



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Parlemen, Jakarta, Senin (12/5).

DPR mengapresiasi, karena salah satu agenda politik di tahun 2014 yaitu

Pemilu Legislatif, telah dapat dilalui dengan selamat, aman dan lancar, walaupun ditengarai banyak terjadi kecurangan, terutama manipulasi suara di sejumlah daerah yang dapat memunculkan gugatan.

Lebih lanjut dikatakan Pramono, semua komponen bangsa sedang mendiskusikan masalah ini. Namun demikian, Pimpinan Dewan mengharapkan bahwa euforia Pilpres ini tidak mengganggu agenda pokok DPR-RI dalam melaksanakan fungsi-fungsi utamanya sebagaimana amanah undang-undang. (As) foto:andry/parle/hr.

DPR Dukung Larangan Ekspor Mineral Mentah



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung.

Dewan mendukung konsistensi Pemerintah untuk melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), karena Dewan sadar bahwa kebijakan hilirisasi atau pembangunan industri hilir (*smelter*), akan meningkatkan pendapatan negara sekaligus membuka lapangan kerja baru.

“Sebagai implikasi dari larangan ekspor mineral dalam bentuk mentah, pengusaha mineral dan batubara wajib membangun *smelter* untuk melakukan pemurnian hasil pertambangan,” tegas Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, Senin (12/5), di Gedung Parlemen, Jakarta, saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun 2013-2014.

Saat ini, menurutnya, kewajiban tersebut banyak mendapat tentangan dari kalangan pengusaha karena

menambah beban perusahaan. Namun demikian, Dewan mengingatkan bahwa pembangunan *smelter* memerlukan waktu persiapan tiga sampai empat tahun dan biaya yang sangat besar, apalagi bisnis pertambangan memiliki resiko ketidakpastian yang tinggi.

Oleh karena itu dewan berharap pemerintah dapat menjaga iklim investasi dan iklim usaha di sektor pertambangan, dengan memberikan berbagai insentif dan kemudahan bagi perusahaan tambang yang berniat membangun *smelter* di dalam negeri.

Tujuan dari insentif ini adalah memberikan kepastian usaha bagi perusahaan pertambangan sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif. “Pemerintah harus menyiapkan infrastruktur yang baik di lokasi pabrik *smelter*, termasuk kecukupan ketenagalistrikan, ketersediaan pelabuhan, jaringan jalan raya atau kereta api serta jaringan telekomunikasi yang dapat diandalkan oleh perusahaan pertambangan untuk menekan biaya produksi,” katanya.

Patut diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VII dengan Menteri ESDM pada Masa persidangan II yang lalu, dibahas tentang pelaksanaan ketentuan UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akhir rapat kerja menyimpulkan bahwa Pemerintah dan Komisi VII bersepakat untuk melaksanakan UU No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara secara konsisten dan seutuhnya. Berkaitan dengan hal ini, Pemerintah pada 11 Januari 2014, mengeluarkan PP No. 1 Tahun 2014 yang melarang ekspor mineral mentah tanpa melalui proses pengolahan. “PP ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah melalui proses hilirisasi,” papar Pramono. (as)/foto:odjie/parle/hr.

Kemenag Diminta Waspadai Bahaya Virus MERS

Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah mendesak Kementerian Agama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya Virus MERS yang saat ini mulai menimpa jamaah haji Indonesia. “Mengingat jamaah haji yang beresiko tinggi kebanyakan adalah usia lanjut, karena itu Kementerian Agama harus menyelenggarakan atau melakukan pengawasan kesehatan terhadap jamaah haji usia lanjut, ini yang harus dilakukan oleh Kemenag,” terangnya kepada Parlemen baru-baru ini.



Ketua Komisi VIII DPR Ida Fauziah.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa menolak masyarakat yang ingin melakukan ibadah haji dan umroh yang perlu dilakukan yaitu mengantisipasi saja. “Perlu dilakukan pendidikan dan usaha preventif untuk menghindari dari bahaya Virus MERS,” katanya.

Disisi lain, lanjutnya, Kemenkes harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada para jamaah bagaimana beribadah haji yang aman. “Misalnya saja menggunakan *masker*, dan apabila ada gejala flu harus segera



memeriksanya,” jelasnya.

Dia menambahkan, Pemerintah harus melakukan sosialisasi terkait penyebaran Virus MERS. “Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada travel haji yang ada,” katanya.

Belum lama ini, terdapat jemaah um-

rah asal Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, yang positif terkena virus *Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus* (MERS-CoV), Jumallang Kaneng Lejja, 84 tahun.

Sementara di Padang, terdapat lima pasien yang dirawat diduga terjangkit flu Arab atau MERS. Mereka adalah ZB,

86 tahun, N (78), NM (62), S (63), dan SY (61) yang diduga terjangkit virus flu Arab. Namun, dari hasil pemeriksaan laboratorium Kementerian Kesehatan, empat dari lima pasien itu dinyatakan negatif terjangkit flu Arab. (Sugeng Irianto) foto:iwan armanias/parle/hr.

Pemilu Legislatif 2014 Sarat Politik Biaya Tinggi

Penyelenggaraan Pemilu legislatif 2014 dinilai sarat politik biaya tinggi. Selain itu, keterpilihan seseorang tidak atas dasar kompetensi integritas namun terjadi atas dasar persiapan finansial.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menanggapi hasil Pemilu legislatif 2014 lalu, kepada Parleментарia baru-baru ini.

“Kultur masyarakat sekarang semakin pragmatis, ini akibat sikap perilaku caleg legislatif yang tidak pernah menepati janjinya saat kampanye lalu,” ujarnya.

Menurutnya, itu harus menjadi kesadaran politik bersama. Pasalnya, sistem politik proporsional terbuka membuat kompetisi tidak sehat di internal partai. “Sistem politik sekarang juga tidak memberikan kesempatan terhadap semua orang banyak pakar yang berintegritas tidak dapat ikut Pemilu Legislatif karena tidak punya uang,” jelasnya.



Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo.

Dia menambahkan, kita harus banyak belajar secara empiris bahwa Parleментарia Treshold (PT) dinaikkan namun tidak bisa meminimalisir jumlah Partai yang ada. “Faktanya jumlah Partai yang masuk DPR malah bertambah, Secara empiris bisa menjawab hasil riset lembaga survey yang mengatakan akan mendegradasi parpol namun nyatanya tidak,” katanya. (Sugeng Irianto)/foto:odjie/parle/hr.

Delegasi Parlemen Kenya Temui Komisi V DPR



Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin M. Said saat menerima Komisi Perhubungan Kenya.

Delegasi Komisi Perhubungan Parlemen Kenya Bertukar Pikiran dengan Komisi V DPR terkait Tugas dan Fungsi antar kedua Parlemen negara sahabat tersebut.

“Tugas pokok fungsinya Komisi Perhubungan Kenya sama dengan Komisi V DPR RI. Komisi V di DPR merupakan alat kelengkapan DPR yang memiliki tugas dan lingkup bidang transportasi, pekerjaan umum, Perumahan rakyat, desa tertinggal, SAR serta BMKG,” ujar Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said, saat menerima delegasi Parlemen Kenya dipimpin oleh Grace Kipchoim,



sementara Komisi V DPR dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Muhidin Said (F-PG), Michael Wattimena (F-PD), Sadarestuwati (F-PDIP), di Ruang Pimpinan Komisi V DPR, Gedung Nusantara II, Rabu, (14/5).

Dia mengatakan, Komisi V DPR juga memiliki tugas melakukan Penyusunan anggaran belanja negara dalam ruang lingkup Komisi V DPR, mengadakan pembahasan dan usul pembahasan anggaran. “Sementara tugas Komisi di bidang pengawasan terhadap UU, yaitu membahas hasil pemeriksaan keuangan dalam lingkup Komisi V DPR, pengawasan penerapan kebijakan pemerintah, dan membahas usulan DPD,” jelasnya.

Menyangkut transportasi, jelasnya, DPR RI telah memiliki UU Lalu Lintas dan Jalan Raya untuk mengatasi persoalan lalu lintas yang berkembang saat ini. “Banyak persoalan transportasi laut dan kami telah melakukan revisi UU tentang pelayaran khususnya angkutan pengebora lepas pantai. Karena banyak persoalan dengan kemajuan industri peminyakan namun belum bisa melayani kapal pengebora lepas pantai jadi kami revisi UU ini,” terangnya.

Menurut Muhidin, DPR terus melakukan monitoring yang rutin terhadap manajemen perhubungan yang ada. Disamping itu, pertumbuhan sepeda motor sangat besar. harus diiringi dengan peningkatan angkutan trans-

portasi massal seperti MRT, monorel, kereta api dan sebagainya. “Bahkan kereta api kami sedang melakukan penambahan jalur sehingga meningkatkan akses perhubungan antar propinsi,” jelasnya.

Sementara Ketua Delegasi Parlemen Kenya Grace Kipchoim mengatakan, tujuan ke DPR RI yaitu untuk berbagi pengalaman dengan otoritas di Indonesia terutama tentang perhubungan dan departemen terkait khususnya jalan raya, penerbangan umum, transportasi dan pemukiman. “Kita mengharapkan semakin meningkatnya kerjasama bilateral antara Kenya dan Indonesia,” katanya. (Sugeng Irianto)/ foto:odjie/parle/hr.

Harry: Saya Minta Maaf Tidak Mampu Melawan Sistem Ini

Anggota Komisi III DPR RI Harry Witjaksono mengatakan sistem pemilu yang dikembangkan saat ini telah menjebak banyak pihak dalam kecurangan sistemik. Jual beli suara terjadi masif mulai dari tingkat PPS dan PPK. Sulit untuk menghadangnya karena caleg harus mandiri menyiapkan saksi dengan anggaran honor yang tidak sedikit.

“Di dapil saya ada 8000 TPS, kalau mau aman saya harus menyiapkan saksi paling tidak di 4000 TPS. Kalau satu saksi Rp100 ribu berarti perlu Rp400 juta hanya untuk satu hari pencoblosan, sementara untuk kampanye sudah lebih dari Rp500 juta. Terus terang saya minta maaf pada konstituen, saya tidak mampu melawan sistem seperti ini,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/5/14).

Dibandingkan Pemilu 2009 lalu menurutnya pemilu kali ini lebih berat terutama dari sisi finansial. Konstituen juga cenderung lebih lugas meminta para caleg memberi bantuan konkrit seperti pembangunan jalan atau infrastruktur lain.

Pada bagian lain Harry menyebut upaya hukum penyelesaian sengketa pemilu yang diupayakan partai politik dan caleg tidak akan mudah. “Kalau maju dalam persidangan bukti-bukti harus sangat kuat, ini tidak mudah karena menyangkut cost dan tenaga,” kata wakil rakyat dari dapil Jabar VI ini.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini berharap dalam pemilu selanjutnya perlu dikaji sistem pemilu yang tidak memberatkan dan lebih berkualitas. Kalau masih ingin menggunakan



Anggota Komisi III DPR Harry Witjaksono.

sistem proporsional terbuka yang perlu dipantau adalah proses pemilu ditingkat bawah.

“Proses ditingkat bawah TPS, PPS dan PPK harus dipantau, kalau sekarang itu KPU hanya menerima limpahan saja. Saya mendapat laporan proses penghitungan suara di TPS yang berlangsung sampai malam tidak ada yang memantau, itu di kota bagaimana dengan TPS yang ada di pelosok,” pungkask dia. (iky) foto:odjie/parle/hr.

DPR Akan Surati Presiden dan Menteri Soal Bidan PTT

Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung berjanji akan segera menyurati dan berkoordinasi dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri terkait, sehubungan permasalahan seputar Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bi-

dan PTT). Pasalnya, permasalahan yang menimpa Bidan PTT semakin berlarut-larut dan belum menemui titik temu.

“Ini sangat memprihatinkan. Para bidan yang kerjanya jauh di pelosok, dari

segi gaji sangat kecil, masih dikenakan pajak dan potongan gaji, ditambah lagi mereka tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan. Kami akan menyurati Presiden dan pemerintah. Kami akan respon secepatnya,”



Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung saat menerima Bidan PTT.

janji Pram, saat menemui perwakilan Forum Komunikasi Bidan PTT Seluruh Indonesia, di ruang rapat Pimpinan DPR, Senin (12/05) lalu.

Politisi PDI Perjuangan ini, atas nama Pimpinan DPR juga akan memanggil Pimpinan Komisi IX, agar permasalahan Bidan PTT ini menjadi prioritas pembahasan di Komisi Kesehatan itu. Ia juga menyatakan kekecewaannya, karena Bidan PTT tidak diperbolehkan melanjutkan pendidikannya.

“Secepatnya koordinasikan dengan Pimpinan Komisi IX DPR. Supaya ini menjadi prioritas Komisi IX. Bidan PTT juga harus diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, selama tidak mengganggu tupoksinya. Bangsa yang mengalokasikan 20% APBN-nya untuk pendidikan, kalau masih ada yang menghalang-halangi orang untuk belajar, itu sebenarnya tidak manusiawi,” imbuh Pram.

Sementara itu, perwakilan Forum Komunikasi Bidan PTT Seluruh Indonesia Lilik Dian Eka Sari meminta Pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 tahun 2013, perihal pembatasan masa tugas Bidan PTT.

“Sehingga, Bidan PTT hanya bisa melaksanakan masa tugas selama 9

tahun, kemudian di nol-kan lagi masa kerjanya. Di Permenkes itu juga kami melihat banyak diskriminatif yang diberikan kepada Bidan PTT, salah satunya adalah pemberian masa cuti yang hanya 40 hari, setelah 1 tahun masa kerja,” jelas Lilik.

Ia mengaku, pihaknya khawatir pada Juli nanti, masa kerja Bidan PTT angkatan 2005 akan berakhir, karena sudah menjalani masa kerja selama 9 tahun. Pemerintah menjanjikan, para Bidan PTT ini akan diangkat kembali dengan mendapatkan nomor registrasi baru, dan di nol-kan kembali masa kerjanya.

“Artinya, sebenarnya tidak diberikan perpanjangan, tapi diangkat kembali. Berarti, masa kerja kami selama 9 tahun tidak dianggap. Kami berharap, pemerintah mencabut Permenkes tersebut. Sehingga, masa kerja kami selama 9 tahun dapat berlanjut,” tegas Lilik.

Dalam aspirasinya, salah satu perwakilan Forum, Yulfi berharap agar RUU Kebidanan dibahas, dan segera disahkan, sehingga seluruh Bidan di Indonesia mempunyai payung hukum, bukan hanya Bidan PTT, tapi seluruh Bidan.

Kami juga mempertanyakan upah kami, kami menerima gaji Rp1,7 juta. Namun kenyataannya, kami hanya

menerima Rp 1,4 juta. Kami ingin mempertanyakan potongan gaji tersebut. Kami meminta Pemerintah mencabut Permenkes nomor 7 Tahun 2013, dan segera revisi Keppres Nomor 77 tahun 2000 yang mendasari penyusunan Permenkes itu. Selama Permenkes ini masih berlaku, maka perlakuan diskriminatif kepada Bidan akan terus berlaku,” tegas Yulfi.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka menyayangkan bentuk diskriminatif yang dilakukan pemerintah terhadap Bidan PTT. Padahal, Bidan PTT ini melakukan pengabdian dalam mengurangi angka kematian.

“Pemerintah mencanangkan pengurangan angka kematian ibu saat melahirkan, tanpa disertai peningkatan kualitas kesejahteraan tenaga kesehatan, khususnya bidan yang menanganinya, ini hanya menjadi omong kosong saja. Kita lihat dari status dan pekerjaan yang mereka lakukan, hampir 24 jam, mereka tidak boleh melanjutkan pendidikan. Ini bentuk diskriminasi,” jelas Rieke.

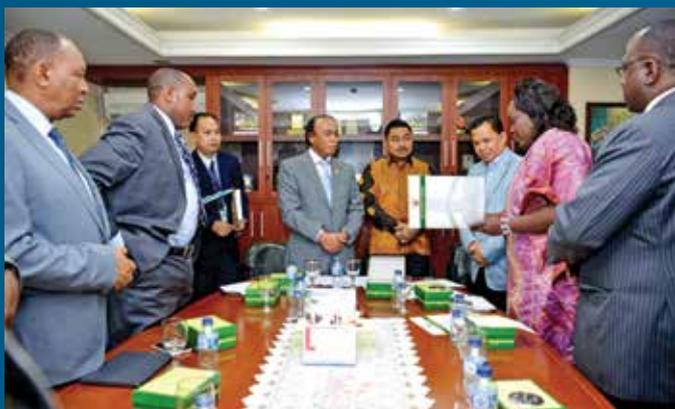
Politisi PDI Perjuangan ini juga meminta agar Permenkes Nomor 7 Tahun 2013 agar segera dicabut, karena tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan. Terkait dengan upah Bidan PTT, ini juga sudah tidak manusiawi.

“Persoalan upah, kalau di perusahaan swasta, jika memberikan upah di bawah minimum, bisa dikenai hukuman penjara. Ini malah pemerintah memberikan upah di bawah upah minimum, Rp 1,7 juta, malah dipotong lagi. Potongannya juga tidak jelas. Kami menilai ini ada indikasi makelar proyek Bidan PTT,” imbuh Rieke.

Rieke juga berjanji, akan segera menyelesaikan RUU Kebidanan, sehingga permasalahan soal bidan ini tidak berlarut-larut. (sf) foto:andry/parle/hr.



Pembukaan Rapat Paripurna Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2013-2014 dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie, Senin (12/5) Foto: Tim Parle/Parle/Hr.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said dan Michael Wattimena menerima Delegasi Parlemen Kenya yang dipimpin Grace Kipchoim di gedung Nusantara II DPR RI, Rabu (14/05) Foto: Naefurodjie/Parle/HR.



Wakil Ketua DPR RI Sohibul Iman didampingi Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti memberikan sambutan pada Press Gathering dengan wartawan koordinatiorat DPR di Bali, Jumat (09/05) Foto: Tim Parle/Parle/Hr.